

## Pengaruh Keadilan Distributif, Keadilan Prosedural, dan Gaya Kepemimpinan terhadap *Fraud*

Luh Putu Devia Aditya\*, Lucy Sri Musmini

Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali, Indonesia

\* deviaadityasingaraja@Gmail.com

### Riwayat Artikel:

Tanggal diajukan:  
15 November 2021

Tanggal diterima:  
19 Desember 2021

Tanggal dipublikasi:  
30 Desember 2021

**Kata kunci:** *fraud*; gaya kepemimpinan; keadilan distributif; keadilan prosedural.

### Pengutipan:

Aditya, Luh Putu Devia & Musmini, Lucy Sri (2021). Pengaruh Keadilan Distributif, Keadilan Prosedural, dan Gaya Kepemimpinan terhadap *Fraud*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 11 (3), 591-600

**Keywords:** *distributive justice*; *fraud*; *leadership style*; *procedural justice*.

### Pendahuluan

Fraud atau kecurangan merupakan tindakan yang memanfaatkan pihak lain sehingga mengalami kerugian untuk keuntungan pribadi. Fraud juga dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang disengaja yang dilakukan oleh individu maupun kelompok yang berdampak negatif atau merugikan bagi pihak lain untuk memperoleh keuntungannya sendiri. Adapun beberapa jenis tindakan kecurangan yaitu penyalahgunaan asset, pemberian pernyataan palsu dalam penyelidikan, dan korupsi. Fenomena terjadinya fraud saat ini masih marak terjadi, khususnya pada sektor pemerintahan. Masih banyak oknum ASN yang tertangkap melakukan tindak kecurangan seperti yang baru-baru ini terjadi yaitu kasus penyalahgunaan dana hibah oleh 8 tersangka ASN yang bekerja di Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng. Selain itu juga kecurangan kerap terjadi pada seleksi CPNS yang dilakukan hamper disetiap

### Abstrak

Fraud merupakan tindak kecurangan yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan cara merugikan pihak lain. Fraud kerap terjadi baik pada Lembaga pemerintahan maupun swasta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh Keadilan Distributif, Keadilan Prosedural, dan Gaya Kepemimpinan terhadap Fraud. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian penyebaran kuisioner dengan teknik sampling jenuh. Penelitian dilakukan kepada seluruh pegawai negeri sipil dan Non PNS di Dinas BKPSDM Kabupaten Buleleng dengan jumlah sampel yang terkumpul sebanyak 100 responden. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Keadilan Distributif, Keadilan Prosedural, dan Gaya Kepemimpinan berpengaruh secara negatif terhadap Fraud. Hal ini berarti bahwa semakin baik kondisi keadilan prosedural, keadilan distributif, dan gaya kepemimpinan yang diterapkan maka akan menekan terjadinya kecurangan dalam perusahaan atau organisasi tersebut.

### Abstract

*Fraud is an act of fraud committed to obtain personal gain by harming other parties. Fraud often occurs in both government and private institutions. This study aims to determine how the influence of distributive justice, procedural justice, and leadership style on fraud. In this study, the researcher used the research method of distributing questionnaires with saturated sampling technique. The study was conducted on all civil servants and non-civil servants at the BKPSDM Office of Buleleng Regency with a total sample of 100 respondents. The results of this study indicate that distributive justice, procedural justice, and leadership style have a negative effect on fraud. This means that the better the conditions of procedural justice, distributive justice, and the applied leadership style will suppress the occurrence of fraud in the company or organization.*

tahunnya. Berikut merupakan beberapa kasus yang berhasil terungkap dipublic terkait kecurangan seleksi CPNS, diantaranya kasus kecurangan dalam tes CPNS di tahun 2013 yang terjadi pada jalur honorer K2 umum berupa pemalsuan SK. Pada tahun 2014 kecurangan dalam seleksi CPNS juga terjadi di Bengkulu, dimana sebanyak 4 orang ditetapkan menjadi tersangka karena ketahuan menjadi "joki" seleksi CPNS dengan penerimaan suap sebesar Rp 1,99 Miliar. Kasus serupa juga terjadi baru-baru ini yaitu pada seleksi CPNS ditahun 2019, dimana seorang ASN tertangkap menjadi "joki" dalam seleksi salah satu peserta CPNS di Kota Pematangsiantar. Kasus kecurangan terakait joki CPNS memang sudah sering terjadi, tidak hanya diluar Bali.

Tindak kecurangan ini juga kerap terjadi di Dinas BKPSDM Kabupaten Buleleng, dimana dari hasil wawancara dengan salah satu pegawai negeri sipil yang bekerja disana tindakan saling "titip" nama dalam pengangkatan pegawai khususnya pegawai kontrak dan honorer sudah sering terjadi. Umumnya "oknum" akan ditawarkan sejumlah uang atau menawari sebagai jalan pengangkatan pegawai kontrak maupun honorer. Namun tak jarang juga sistem "titip nama" ini dilakukan atas perintah atasan. PSAK 70 (SA 316) menyebutkan bahwa terdapat tiga kondisi yang menyebabkan fraud tersebut terjadi yaitu adanya tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi atau biasa disebut sebagai Fraud Triangel. Pada lembaga pemerintahan tekanan yang kerap dirasakan adalah tekanan pada perekonomian individunya, dimana seperti yang diketahui bahwa gaji seorang PNS memang tidak sebesar gaji para pegawai yang bekerja pada perusahaan-perusahaan swasta. Kedua adalah kesempatan, dimana seorang pegawai akan dengan mudah melakukan tindak kecurangan (fraud) apabila pengendalian internalnya lemah atau buruk. Pegawai biasanya akan memanfaatkan kondisi pengendalian internal yang lemah untuk melakukan tindak kecurangan seperti contohnya pencurian pada aset persediaan atau memanipulasi laporan keuangan. Ketiga adalah rasionalisasi yaitu pembenaran atas sikap seseorang yang melakukan kecurangan (fraud), dimana seseorang atau kelompok yang telah melakukan tindak kecurangan akan berusaha mencari alasan untuk membenarkan tindakannya tersebut. Sebagian besar pegawai akan meniru tindakan yang dilakukan oleh atasannya meskipun itu sebuah tindak kecurangan dan nantinya ia akan membenarkan apa yang dilakukannya tersebut.

Namun diluar itu terdapat pula beberapa faktor lain yang menyebabkan fraud itu terjadi diantaranya adalah pengendalian internal yang lemah, adanya asimetri informasi dalam organisasi, kesesuaian gaji atau kompensasi, budaya organisasi, komitmen organisasi, moralitas individu, gaya kepemimpinan, keadilan distributif, dan keadilan prosedural. (Ganto, 2019) pada penelitian menyatakan bahwa keadilan distributif merupakan sebuah persepsi tentang keseimbangan dan kewajaran antara masukan yang diberikan pegawai dengan hasil yang diperolehnya dari organisasi atau instansi tertentu. (Wulandari & Suryandari, 2016) menyatakan pengertian dari keadilan prosedural merupakan persepsi tentang adil atau tidaknya prosedur pemberian gaji, upah, atau kompensasi yang dijalankan oleh suatu perusahaan. Secara umum keadilan prosedural merupakan suatu proses tentang bagaimana hasil yang diperoleh oleh suatu organisasi akan didistribusikan kepada para pegawai apakah sudah adil atau belum. (Panggabean, 2016) menyatakan gaya kepemimpinan sebagai ilmu sosial yang dijadikan ilmu terapan terkait dengan rumusan dan segala prinsip yang nantinya diharapkan memberikan kesejahteraan pada masyarakat. Gaya kepemimpinan setiap individu dalam suatu organisasi atau perusahaan tentunya akan berbeda satu sama lain. Setiap individu pasti memiliki gaya atau acuan tertentu yang dianggap baik dan cocok dalam memimpin bawahannya.

(Najahningrum, 2013) pada penelitiannya menyatakan bahwa keadilan distributif dan keadilan prosedural memiliki pengaruh negatif terhadap kecerendungan fraud, dimana ini berarti bahwa keadilan distributif dan keadilan prosedural dapat meminimalisir terjadinya perilaku fraud. Hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wulandari & Suryandari, 2016) yang menyatakan bahwa keadilan distributif dan keadilan prosedural tidak berpengaruh terhadap kecerendungan fraud atau kecurangan. (Panggabean, 2016) menyatakan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh secara negatif

terhadap kecurangan, dimana dengan gaya kepemimpinan yang baik maka akan menurunkan tingkat kecurangan yang mungkin terjadi dalam organisasi atau perusahaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh Keadilan Distributif, Keadilan Prosedural, dan Gaya Kepemimpinan terhadap Fraud.

### Metode

Penelitian ini menggunakan teknik penelitian kuantitatif yang menggunakan suatu instrumen penelitian untuk dapat mengukur dan mengolah data secara statistik. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik penyebaran kuisioner yang berisi sejumlah draf pernyataan yang harus dijawab oleh responden. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik sampling jenuh dengan jumlah sampel sebanyak 125 responden yang terdiri dari pegawai negeri sipil dan non-PNS di Dinas BKPSDM Kabupaten Buleleng. Variabel penelitian yang digunakan terdiri dari variabel bebas yaitu Keadilan Distributif (X1), Keadilan Prosedural (X2), dan Gaya Kepemimpinan (X3) dan variabel terikatnya yaitu Fraud (Y). Pengukuran skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert yaitu skala untuk mengukur pendapatan, sikap, dan persepsi seorang individu maupun kelompok tentang fenomena sosial dimana responden atau narasumber akan memilih setuju atau tidak setuju terhadap pernyataan atau pertanyaan yang disajikan (Sugiyono, 2017).

**Tabel 1**  
**Ukuran Skala Likert**

| Keterangan                | Skor |
|---------------------------|------|
| Sangat Setuju (SS)        | 5    |
| Setuju (S)                | 4    |
| Ragu-Ragu (RR)            | 3    |
| Tidak Setuju (TS)         | 2    |
| Sangat Tidak Setuju (STS) | 1    |

Hasil penelitian nantinya akan diolah menggunakan beberapa teknik dan metode analisis data, diantaranya yang pertama adalah uji kualitas data yang dibagi menjadi 3 uji yaitu : uji validitas merupakan pengujian pada kuisioner untuk membuktikan bahwa setiap butir pernyataan pada kuisioner penelitian telah menggambarkan hal yang akan diukur. Pengujian validitas pada penelitian ini menggunakan Pearson Correlation pada program SPSS 20.0. Selanjutnya ada uji reliabilitas, dimana instrumen penelitian dapat dikatakan reliabel apabila hasil yang diperoleh selalu sama setelah diuji beberapa kali, dalam penelitian ini uji reliabilitas menggunakan Alpha Crobach yang terdapat dalam SPSS 20.0. Dan uji terakhir adalah uji asumsi klasik yaitu mengukur apakah model regresi telah memenuhi asumsi klasik. Uji ini dibagi lagi menjadi 3 yaitu uji normalitas yang digunakan untuk menguji apakah model regresi variabel independen dan dependen atau keduanya terdistribusi dengan normal atau tidak (Ghozali, 2016), uji multikolinearitas yaitu untuk menguji apakah terdapat korelasi yang sempurna atau tinggi antara variabel independen dan dependen dalam model regresi, dan yang ketiga adalah uji heterokedisitas yaitu untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji terakhir adalah uji hipotesis, dimana dalam penelitian ini uji hipotesis dibagi menjadi : analisis regresi linier berganda yaitu uji yang digunakan untuk menganalisis pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap variabel dependen. Kedua ada koefisien determinasi yaitu uji yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel terikat (Ghozali, 2016). Terakhir ada uji T yaitu uji yang digunakan untuk melihat bagaimana signifikansi dari pengaruh independen secara individu terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel lain bersifat konstan (Sugiyono, 2017).

## Hasil dan Pembahasan

Pengujian data dilakukan untuk bisa mengetahui apakah data yang diperoleh telah mewakili keadaan pada subjek yang diukur. Adapun hasil pengujian data ini dibagi menjadi 2 yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas pada penelitian ini menggunakan program dalam SPSS 20.0 dengan hasil yang menunjukkan bahwa variabel kecurangan (Y), keadilan distributif (X1), keadilan prosedural (X2), dan gaya kepemimpinan (X3) dinyatakan valid dengan nilai signifikai yang lebih kecil dari 0,05 dan nilai r kritis (r hitung) lebih besar dari r tabel yaitu 0,1966. Uji reliabilitas pada peneilitian ini juga enggunakan program dari SPSS 20,0 dengan hasil variabel kecurangan (Y), keadilan distributif (X1), keadilan prosedural (X2), dan gaya kepemimpinan (X3) reliabel karena nilai Cronbach Alpha yang lebih besar dari 0,70.

### Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan sebelum pengujian untuk menganalisis data, dimaa pada penelitian ini uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas, uji heterskedastisitas, dan uji

multikolinearitas. Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah model regresi variabel independen dan variabel dependen atau keduanya terdistribusi dengan normal atau tidak. Pada peneitian ini uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa data terdistribusi dengan normal karena nilai tes statistic yang lebih besar dari 0,05. Hasil dari uji ini adalah semua variabel independen terbebas dari multikolinearitas karena nilai toleransi yang lebih besar dari 0,1 dan VIF yang lebih kecil dari 10. Uji heteroskedasitas digunakan untuk mengetahui model regresi apakah terjadi ketidaksanaan variasi dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya atau tidak. Uji ini menggunakan metode Glejser dengan cara menyusun regresi antara nilai absolut residual dengan variabel bebas. Hasil dari uji ini menunjukkan bahwa semua variabel independen tidak mengalami heteroskedastisitas dengan tingkat signifikansi yang lebih besar dari 0,05.

### Uji Hipotesis

Uji hipotesis pada penelitian ini dibagi menjadi tiga yaitu uji koefisien determinasi (R<sup>2</sup>), uji hipotesis (uji t), dan uji analisis regresi linier berganda. Uji koefisien determinasi ini digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Adapun hasil dari uji ini menunjukkan bahwa variabel keadilan distributif (X1), keadilan prosedural (X2), dan gaya kepemimpinan (X3) berpengaruh terhadap kecurangan/fraud (Y) dengan nilai koefisien determinasi sebesar 0,970 atau sebesar 97%.

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi**

| Model | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1     | .985 <sup>a</sup> | .970     | .969              | .570                       |

Sumber: Data diolah (2021)

Uji t digunakan untuk melihat bagaimana signifikansi dari pengaruh independen secara individu terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel lain bersifat konstan (Sugiyono, 2017). Hasil dari uji t ini menunjukkan bahwa variabel keadilan distributif (X1) memiliki nilai signifikansi sebesar  $0,008 < 0,05$  yang berarti bahwa keadilan distributif (X1) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecurangan (Y). Variabel keadilan prosedural (X2) memiliki nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  yang berarti bahwa variabel keadilan prosedural (X2) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecurangan (Y). Variabel gaya kepemimpinan (X3) memiliki nilai signifikansi sebesar  $0,025 < 0,05$  yang berarti bahwa variabel gaya kepemimpinan (X3) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecurangan (Y).

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Hipotesis (uji t)**

| Model                     | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | T       | Sig. |
|---------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|---------|------|
|                           | B                           | Std. Error | Beta                      |         |      |
| 1 (Constant)              | 64.296                      | .757       |                           | 84.959  | .000 |
| Keadilan Distributif (X1) | -.193                       | .071       | -.092                     | -2.725  | .008 |
| Keadilan Prosedural (X2)  | -1.140                      | .050       | -.852                     | -22.751 | .000 |
| Gaya Kepemimpinan (X3)    | -.112                       | .049       | -.067                     | -2.282  | .025 |

Sumber: Data diolah (2021)

Uji analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Hasil dari uji ini menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi untuk variabel keadilan distributif (X1) sebesar -0,193 yang berarti bahwa setiap peningkatan satu satuan variabel keadilan distributif akan menurunkan nilai variabel kecurangan (Y) sebesar 0,193. Nilai koefisien regresi untuk variabel keadilan prosedural (X2) sebesar -1,140 yang berarti bahwa setiap peningkatan satu satuan variabel keadilan prosedural akan menurunkan nilai variabel kecurangan (Y) sebesar 1,140. Nilai koefisien untuk variabel gaya kepemimpinan sebesar -0,112 yang berarti bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel gaya kepemimpinan akan menurunkan variabel kecurangan (Y) sebesar 0,112.

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda**

| Model                       | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients |
|-----------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|
|                             | B                           | Std. Error | Beta                      |
| (Constant)                  | 64.296                      | .757       |                           |
| 1 Keadilan Distributif (X1) | -.193                       | .071       | -.092                     |
| Keadilan Prosedural (X2)    | -1.140                      | .050       | -.852                     |
| Gaya Kepemimpinan (X3)      | -.112                       | .049       | -.067                     |

Sumber: Data diolah (2021)

#### *Pembahasan Hasil Penelitian*

##### Pengaruh Keadilan Distributif terhadap Kecurangan (Fraud)

Keadilan distributif berdasarkan equity theory merupakan sebuah persepsi tentang keseimbangan dan kesetaraan yang diperoleh oleh karyawan dari perusahaan atau organisasi dengan apa yang diberikan karyawan tersebut kepada perusahaan atau organisasi tempatnya bekerja (Ganto, 2019). Hasil yang diperoleh pun dapat berupa reward seperti gaji atau kompensasi yang diberikan oleh perusahaan yang disesuaikan dengan masukan yang diberikan oleh karyawan yang bersangkutan. (Najahningrum, 2013) juga mendefinisikan keadilan distributif sebagai sebuah konsep keadilan antara barang dan keadaan yang akan membawa kesejahteraan kepada karyawan seperti contohnya kesejahteraan sosial, ekonomi, fisik, dan psikis.

Penelitian ini melibatkan 100 responden yaitu pegawai di Dinas BKPSDM Kabupaten Buleleng. Penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh Keadilan Distributif (X1) terhadap Fraud (Y) pada Dinas BKPSDM Kabupaten Buleleng. Variabel Keadilan Distributif diukur dengan menggunakan kuesioner. Skor maksimum pada variabel Keadilan Distributif sebesar

20 dengan jumlah pertanyaan 4, diperoleh rata-rata sebesar 5. Skor minimum sebesar 16 dengan jumlah pernyataan 4, sehingga didapatkan rata-rata sebesar 4. Hal ini menunjukkan bahwa jawaban responden sebagian besar setuju dan menyatakan sangat setuju.

Variabel Fraud (Y) memiliki skor maksimum sebesar 27 dengan jumlah pertanyaan 9, diperoleh rata-rata sebesar 3. Skor minimum sebesar 16 dengan jumlah pernyataan 9, sehingga didapatkan rata-rata sebesar 2,5. Hal ini menunjukkan bahwa jawaban responden sebagian besar tidak setuju dan menyatakan ragu-ragu.

Ini menunjukkan bahwa Keadilan Distributif mempengaruhi Fraud yang artinya semakin tinggi Keadilan Distributif, maka akan mengurangi tindakan Fraud. Begitu pula sebaliknya, disaat pegawai tidak mendapatkan keadilan yang meliputi aspek ekonomi, sosial, fisik dan psikologi maka fraud akan terindikasi.

Berdasarkan uji hipotesis (uji t), variabel keadilan distributif memiliki nilai signifikansi sebesar 0,008 lebih kecil dari 0,05 serta t hitung bernilai negatif sebesar 2,725 lebih besar dari 1,98498 (t tabel), berarti H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>1</sub> diterima sehingga dapat dikatakan bahwa Keadilan Distributif (X<sub>1</sub>) berpengaruh secara negatif (nilai B negatif sebesar 0,193) dan signifikan terhadap Fraud / Kecurangan. Hal ini menunjukkan semakin tinggi keadilan distributif maka akan semakin rendah tingkat Fraud / Kecurangan di Dinas BKSDM Kabupaten Buleleng. Hasil penelitian ini sesuai dengan konsep atau teori Keadilan dan Rasionalisasi. Dapat dijelaskan, pegawai Dinas BKSDM di Kabupaten Buleleng sebagian besar telah mendapatkan keadilan distributif berupa reward yang didistribusikan pada pegawai sesuai dengan kedudukannya maupun dari segi prestasi, tanggungjawab yang telah dituntaskan dengan baik. Pegawai telah merasakan adanya keadilan distributif yang berjalan baik pada dinas, sehingga pegawai tidak memiliki anggapan bahwa tindakan illegal yang dilakukannya itu benar dan dapat diterima karena apa yang telah diberikan pegawai kepada perusahaan telah mendapat timbal balik dan merasa cukup dengan perolehan dari kinerja yang pegawai hasilkan. Rasionalisasi merupakan bagian dari Fraud Triangel yang berperan sebagai suatu pembenaran bagi para pelaku tindak kecurangan, dimana mereka akan menggunakan alasan yang dianggapnya sesuai dengan norma dimasyarakat untuk membenarkan tindakan yang dilakukannya.

Penelitian yang dilakukan oleh (Najahningrum, 2013) menemukan bahwa adanya pengaruh negative antara keadilan distributif terhadap kecenderungan kecurangan (fraud). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Oktavia et al., 2020) menunjukkan bahwa keadilan distributif berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecurangan. Maka, dapat dikatakan keadilan distributif memiliki peranan penting bagi dinas untuk menciptakan perilaku dan pikiran positif yang timbul pada pegawai untuk meminimalisir tindak kecurangan. Semakin baik keadilan distributif yang diberikan, maka semakin rendah tindak kecurangan.

#### Pengaruh Keadilan Prosedural Terhadap Kecurangan/Fraud

Keadilan prosedural menggambarkan tingkat kewajaran atas hasil yang didistribusikan suatu organisasi berdasarkan proses-proses yang dijalankannya. Keadilan prosedural juga berperan penting terhadap peningkatan kinerja seseorang, hal ini karena ketika karyawan dapat menjalankan pekerjaannya sesuai dengan aturan yang berlaku maka hasil yang diperoleh juga akan baik dan maksimal. Sebuah organisasi harus memiliki prosedur yang jelas yang wajib dijalankan oleh seluruh anggota organisasi didalamnya. Saat keadilan prosedural telah dijalankan dan diterapkan dengan baik didalam organisasi, maka kemungkinan karyawan melakukan tindak kecurangan akan berkurang hal ini karena karyawan sudah dituntut untuk mengikuti prosedur kinerja perusahaan dan ikut serta dalam menilai apakah prosedur yang dijalannya sudah baik atau belum. Secara perasaan, akan menimbulkan ketidakpuasan bagi pegawai tersebut sehingga akan menyebabkan pegawai tersebut melakukan apa saja karena dirinya merasa tertekan termasuk dengan melakukan kecurangan (Najahningrum, 2013). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi keadilan prosedural pada suatu instansi dapat meminimalisir terjadinya tindak kecurangan (fraud).

Penelitian ini melibatkan 100 responden yaitu pegawai di Dinas BKSDM Kabupaten Buleleng. Penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh Keadilan Prosedural (X2) terhadap Fraud (Y) pada Dinas BKSDM Kabupaten Buleleng. Variabel Keadilan Prosedural diukur dengan menggunakan kuesioner. Skor maksimum pada variabel Keadilan Distributif sebesar 35 dengan jumlah pertanyaan 7, diperoleh rata-rata sebesar 5. Skor minimum sebesar 28 dengan jumlah pernyataan 7, sehingga didapatkan rata-rata sebesar 4. Hal ini menunjukkan bahwa jawaban responden sebagian besar setuju dan menyatakan sangat setuju. Variabel Fraud (Y) memiliki skor maksimum sebesar 27 dengan jumlah pertanyaan 9, diperoleh rata-rata sebesar 3. Skor minimum sebesar 16 dengan jumlah pernyataan 9, sehingga didapatkan rata-rata sebesar 2,5. Hal ini menunjukkan bahwa jawaban responden sebagian besar tidak setuju dan menyatakan ragu-ragu. Ini menunjukkan bahwa Keadilan Prosedural mempengaruhi Fraud yang artinya semakin baik Keadilan Prosedural, maka akan mengurangi tindakan Fraud. Begitu pula sebaliknya, disaat tidak adanya keadilan prosedural maka fraud akan terindikasi.

Berdasarkan uji hipotesis (uji t), variabel keadilan prosedural memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 serta t hitung bernilai negatif sebesar 22,751 lebih besar dari 1,98498 (t tabel), berarti H0 ditolak dan H2 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa Keadilan Prosedural (X2) berpengaruh secara negatif (nilai B negatif sebesar 1,140) dan signifikan terhadap Fraud / Kecurangan. Hal ini menunjukkan semakin tinggi keadilan prosedural maka akan semakin rendah tingkat Fraud / Kecurangan di Dinas BKPSDM Kabupaten Buleleng. Hasil penelitian ini sesuai dengan konsep atau teori Keadilan dan Rasionalisasi. Keadilan prosedural merupakan gambaran tentang tingkat kewajaran atas hasil yang didistribusikan suatu organisasi berdasarkan proses-proses yang dijalankannya. Sedangkan Teori Rasionalisasi yaitu suatu sikap pembenaran yang seseorang atas tindakan mereka yang telah melakukan kecurangan atau perilaku yang tidak etis. Organisasi akan dianggap baik apabila organisasi tersebut tidak membiarkan tindak kecurangan terjadi dengan membuat komitmen pada organisasinya yang dijalankan oleh seluruh anggota yang ada didalam organisasi tersebut (Ristianingsih, 2017). Suatu prosedur dapat dikatakan adil disaat memiliki enam aturan yaitu konsistensi, meminimalisasi bias, informasi yang akurat, dapat diperbaiki, representatif dan etis. Keadilan pada setiap individu berbeda satu dengan lainnya, sehingga pejabat tinggi memberi kesempatan pegawai untuk memberi masukan atau keluh kesahnya kepada atasan maupun sebaliknya mengenai semua kebijakan yang berkaitan dengan kebijakan prosedur penggajian dan pemberian kompensasi. Sehingga bersama-sama pegawai dapat mematuhi aturan yang telah ditetapkan sesuai keputusan bersama. Pemikiran untuk berbuat kecurangan mampu diminimalisir kedepannya oleh Dinas BKPSDM di Kabupaten Buleleng.

Penelitian yang dilakukan oleh (Najahningrum, 2013) menemukan bahwa adanya pengaruh negatif antara keadilan prosedural terhadap kecenderungan kecurangan (fraud). Maka, dapat dikatakan keadilan procedural memiliki peranan penting bagi dinas demi kelancaran instansi kedepannya. Semakin baik keadilan prosedural, maka semakin rendah tindak kecurangan. Sangat penting bagi suatu organisasi memiliki tingkat kewajaran atas proses pelaksanaan pekerjaannya, hal ini untuk mencegah terjadinya kecurangan yang dilakukan. Pegawai pada Dinas BKPSDM di Kabupaten Buleleng merasakan penting adanya prosedur baku yang wajib diikuti dan dipatuhi oleh seluruh orang yang tergabung pada instansi.

#### Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Kecurangan/Fraud

(Panggabean, 2016) mendefinisikan kepemimpinan sebagai suatu ilmu hasil terapan dari ilmu sosial yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Secara umum gaya kepemimpinan merupakan suatu tata cara yang digunakan individu dalam memimpin dan membimbing bawahan atau karyawannya ketika menjalankan tugas di perusahaan. Penelitian ini melibatkan 100 responden yaitu pegawai di Dinas BKPSDM Kabupaten Buleleng. Penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh Gaya Kepemimpinan (X3) terhadap Fraud (Y) pada Dinas BKPSDM Kabupaten Buleleng. Variabel Gaya

Kepemimpinan diukur dengan menggunakan kuesioner. Skor maksimum pada variabel Keadilan Distributif sebesar 25 dengan jumlah pertanyaan 5, diperoleh rata-rata sebesar 5. Skor minimum sebesar 19 dengan jumlah pernyataan 5, sehingga didapatkan rata-rata sebesar 3,8. Hal ini menunjukkan bahwa jawaban responden sebagian besar setuju dan menyatakan sangat setuju.

Variabel Fraud (Y) memiliki skor maksimum sebesar 27 dengan jumlah pertanyaan 9, diperoleh rata-rata sebesar 3. Skor minimum sebesar 16 dengan jumlah pernyataan 9, sehingga didapatkan rata-rata sebesar 2,5. Hal ini menunjukkan bahwa jawaban responden sebagian besar tidak setuju dan menyatakan ragu-ragu. Ini menunjukkan bahwa Gaya Kepemimpinan mempengaruhi Fraud yang artinya semakin baik Gaya Kepemimpinan, maka akan mengurangi tindakan Fraud. Begitu pula sebaliknya, disaat Gaya Kepemimpinan dirasa buruk oleh staff pegawai, atasan memberikan contoh yang tidak baik, maka akan timbul rasa ingin mengikuti atasan yang juga melakukan kecurangan sehingga semakin tinggi kecenderungan kecurangan yang akan terjadi. Berdasarkan uji hipotesis (uji t), variabel Gaya Kepemimpinan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,025 lebih kecil dari 0,05 serta t hitung bernilai negatif sebesar 2,282 lebih besar dari 1,98498 (t tabel), berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_3$  diterima sehingga dapat dikatakan bahwa Gaya Kepemimpinan ( $X_3$ ) berpengaruh secara negatif (nilai B negatif sebesar 0,112) dan signifikan terhadap Fraud / Kecurangan. Hal ini menunjukkan semakin baik Gaya Kepemimpinan maka akan semakin rendah tingkat Fraud / Kecurangan di Dinas BKPSDM Kabupaten Buleleng.

Hasil penelitian ini sesuai dengan konsep atau teori Rasionalisasi yaitu suatu sikap pembenaran yang seseorang atas tindakan mereka yang telah melakukan kecurangan atau perilaku yang tidak etis. Organisasi akan dianggap baik apabila organisasi tersebut tidak membiarkan tindak kecurangan terjadi dengan membuat komitmen pada organisasinya yang dijalankan oleh seluruh anggota yang ada didalam organisasi tersebut (Ristianingsih, 2017). Dapat dijelaskan, pegawai Dinas BKPSDM di Kabupaten Buleleng sebagian besar telah merasakan gaya kepemimpinan yang demokratis dimana pengambilan keputusan secara bersama-sama sehingga timbulnya moral yang tinggi pada pegawai, tingkat kerja sama semakin baik, dan lebih tertuju pada hasil kerja yang berkualitas. Tidak adanya contoh yang buruk dari pemimpin maupun rekan kerja sehingga tidak muncul pemikiran untuk melakukan kecurangan karena mereka menganggap kecurangan adalah tindakan yang tidak benar dan tidak sesuai norma yang berlaku.

Penelitian yang dilakukan oleh (Panggabean, 2016) menemukan bahwa adanya pengaruh negatif antara gaya kepemimpinan terhadap kecenderungan kecurangan (fraud). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Oktavia et al., 2020) menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecurangan. Maka, dapat dikatakan gaya kepemimpinan memiliki peranan penting juga bagi dinas untuk menciptakan perilaku dan pikiran positif yang timbul pada pegawai untuk meminimalisir tindak kecurangan. Semakin baik gaya kepemimpinan yang diterapkan, maka semakin rendah tindak kecurangan. Pegawai pada Dinas BKPSDM di Kabupaten Buleleng merasakan adanya gaya kepemimpinan yang baik bersifat demokratis dari atasan atau pimpinan dalam memimpin dan mengarahkan bawahan atau pegawainya dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dalam instansi. Dengan adanya gaya kepemimpinan yang baik tersebut, sehingga pegawai merasakan suasana kerja yang baik dan kenyamanan dalam bekerja, maka tindak kecurangan dapat diminimalisir pada dinas BKPSDM di Kabupaten Buleleng.

### **Simpulan dan Saran**

Berdasarkan hasil olah data dan penelitian diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- 1.Keadilan Distributif ( $X_1$ ) berpengaruh secara negatif terhadap Fraud. Hal ini berarti semakin baik tingkat keadilan distributif dalam suatu organisasi atau perusahaan maka akan menurunka tingkat kecurangan yang mungkin terjadi. Ketika pegawai atau karyawan dalam suatu perusahaan sudah merasa bahwa gaji atau kompensasi yang diterima sesuai dengan

pekerjaan yang telah dilakukannya maka dapat dikatakan perusahaan tersebut telah menjalankan keadilan dalam pendistribusian gaji dengan baik sehingga dapat meminimalisir terjadinya kasus atau tindak kecurangan.

2. Keadilan Prosedural (X2) berpengaruh secara negatif terhadap Fraud. Hal ini berarti bahwa semakin baik tingkat keadilan prosedural yang ada dalam perusahaan atau organisasi maka akan semakin rendah pula tingkat kecurangan yang terjadi. Keadilan prosedural yang dimaksud adalah bagaimana perusahaan secara adil memberikan gaji atau kompensasi sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ketika karyawan merasa bahwa prosedur yang dijalankan perusahaan sudah baik dan dirasa adil, maka tindak kecurangan bisa ditekan.

3. Gaya Kepemimpinan (X3) berpengaruh secara negatif terhadap Fraud. Hal ini berarti semakin baik gaya kepemimpinan yang diterapkan dalam organisasi atau perusahaan maka akan menekan jumlah tindak kecurangan yang mungkin terjadi. Gaya kepemimpinan yang diterapkan pun pasti akan berbeda di setiap perusahaan, namun apapun bentuk gaya kepemimpinannya haruslah sesuai dengan peraturan dan keadaan perusahaan itu sendiri. Semakin baik dan sesuai, karyawan pun akan dengan senang hati terus bekerja dan tindak kecurangan pun dapat diminimalisir.

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan simpulan diatas, maka ada beberapa saran yang dapat diberikan penulis yaitu:

1. Kepada Dinas BKPSDM Kabupaten Buleleng

Saran yang dapat saya berikan kepada dinas BKPSDM Kabupaten Buleleng terkait dengan perijokan pegawai adalah diharapkan kedepannya dapat mengadakan perekrutan pegawai sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang seharusnya. Diharapkan pula dinas ini dapat memberikan data-data yang lebih transparan kepada public, mengingat perekrutan pegawai khususnya pegawai kontrak maupun honorer sangat jarang diumumkan ke publik. Selain itu juga pemberian sanksi yang semestinya juga harus dilakukan kepada pegawai atau aparat sipil negara yang tertangkap melakukan tindak kecurangan seperti misalnya "suap" dalam memasukan nama titipan untuk perekrutan pegawai kontrak atau honorer.

2. Kepada Peneliti Selanjutnya

Saran yang dapat saya berikan untuk peneliti selanjutnya adalah diharapkan peneliti dapat mengevaluasi dan meneliti variabel-variabel lain yang tidak terdapat dalam tulisan ini, seperti pengendalian internal (Najahningrum, 2013), Peneliti selanjutnya juga dapat menggunakan atau memilih variabel yang masih jarang digunakan khususnya dalam pembahasan Fraud, daya saing (Andayani & Sari, 2019).

## Daftar Rujukan

- Andayani, Y., & Sari, V. F. (2019). Pengaruh Daya Saing, Gender, Fraud Diamond terhadap Perilaku Kecurangan Akademik Mahasiswa (Studi Kasus pada Mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Negeri Padang). *JEA Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1458–1471. <http://jea.ppi.unp.ac.id/index.php/jea/issue/view/12>
- Ganto, J. (2019). Keadilan Distributif dan Keadilan Prosedural serta Pengaruhnya terhadap Kepuasan Kerja. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 26(1), 156–164. <http://ejournal.upi.edu/index.php/JAPSPs>
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program BM SPSS 23* (8th, Cetakan ke VIII ed.). Universitas Diponegoro.
- Najahningrum, A. F. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan (Fraud): Persepsi Pegawai Dinas Provinsi DIY. *Accounting Analysis Journal*, 2(3), 259–267. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aa>

- Oktavia, D., Astuti, T. P., & Harjito, Y. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecurangan di Pemerintah Kabupaten Klaten. *Accounting Global Journal*, 4(1), 17–35. <https://jurnal.umk.ac.id/index.php/AccGlobal/article/view/4592/2079>
- Panggabean, J. (2016). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fraud di Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Karo*.
- Ristianingsih, I. (2017). Telaah Konsep Fraud Diamond Theory dalam Mendeteksi Perilaku Fraud di Perguruan Tinggi. *Prosiding Seminar Nasional Dan Call For Paper Ekonomi Dan Bisnis*, 128–139.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Cetakan Ke-26). Alfabeta.
- Wulandari, R., & Suryandari, D. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fraud pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung. *Accounting Analysis Journal*, 5(2), 76–85. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj/article/view/14363>